

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**



**Selong, 31 Januari 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PERHUBUNGAN**

**Tahun Anggaran 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya sehingga alhamdulillah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

Tersusunnya LKjIP ini tak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu izinkan kami dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Harapan kami dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 ini kiranya dapat memberikan gambaran kepada Bupati Lombok Timur mengenai pelaksanaan tugas selama 1 tahun, selanjutnya dapat mengambil kebijakan dengan mengarah pada pencapaian visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

Selong, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



**BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670422 198803 2 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Dasar Hukum .....	1
1.3.    Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.4.    Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kab. Lotim .....	3
1.5.    Kepegawaian .....	7
1.6.    Isu Strategis / Permasalahan.....	9
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1.    Visi dan Misi .....	12
2.2.    Tujuan dan Sasaran .....	12
2.3.    Kebijakan .....	13
2.4.    Rencana Kerja Tahunan.....	13
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1.    Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.2.    Realisasi Anggaran.....	36
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
4.1.    Kesimpulan .....	41
4.2.    Saran dan Rekomendasi .....	42
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan negara harus mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan menyelenggarakan pemerintahan yang Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari KKN.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur merupakan instansi yang membantu Bupati Lombok Timur dalam bidang Perhubungan sesuai instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan evaluasi terhadap Rencana Kerja kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2018-2023 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tujuan Penyusunan LKjIP Ini adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungnya bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas membantu Bupati Lombok Timur dalam Urusan Pemerintahan

---

LKjIP Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur TA. 2022

Daerah di Bidang Perhubungan baik Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis Bidang Perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, pengendalian dan operasional perhubungan darat dan laut;
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di bidang Perhubungan;
6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur mempunyai :

##### **1.4.1. Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala, dimana Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas Perhubungan dan 3 (Tiga) orang Kepala Bidang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, meliputi sub bagian :
  - ✚ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - ✚ Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:
  - ✚ Seksi Lalu Lintas;
  - ✚ Seksi Angkutan; dan
  - ✚ Seksi Keselamatan.
4. Bidang Prasarana, terdiri atas:
  - ✚ Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  - ✚ Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
  - ✚ Seksi Perawatan Prasarana.
5. Bidang Pengembangan dan Teknik, terdiri atas:
  - ✚ Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - ✚ Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
  - ✚ Seksi Pengujian Sarana dan Terminal.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

#### **1.4.2. Tugas pokok dan Fungsi masing-masing sub unit**

##### **1.4.2.1. Tugas Pokok**

Tugas pokok masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian dan urusan keuangan dan pelaporan.
  - ✚ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - ✚ Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan dan melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
3. Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis dibidang manajemen rekayasa lalu lintas, angkutan dan terminal, pembinaan keselamatan dan pengendalian operasional lalu lintas;

4. Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang angkutan dan pengendalian operasional, kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran;
5. Bidang Sarana dan Prasarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.

#### **1.4.2.2. Fungsi**

Fungsi masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

##### **1. Sekretariat mempunyai fungsi**

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
- c. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan;
- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- h. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas;

- i. penyusunan konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh KepalaDinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Bidang Prasarana**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh KepalaDinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **4. Bidang Pengembangan dan Teknik**

- a. Pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan pengujian sarana dan terminal;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.5. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan per 31 Desember 2022 berjumlah 45 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 42 orang dan perempuan berjumlah 3 orang

Bila dibandingkan dengan keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 yang berjumlah 47 orang, terjadi pengurangan sebanyak 2 orang menjadi 45 orang. Hal ini disebabkan karena memasuki usia pensiun dan meninggal dunia.

Jumlah PNS berdasarkan status pegawai dan Tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah karyawan/karyawati berdasarkan tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan 31 Desember 2022

No	Status Pegawai	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	Jumlah
1.	PNS			15	4	21	2	-	42
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	-	<b>42</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa keberadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur termasuk sudah memadai untuk menangani berbagai persoalan perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan dengan jumlah pegawai yang sudah berpendidikan Sarjana baik itu Sarjana Strata Satu (S1) maupun Sarjana Strata Dua (S2) 58 persen dari total PNS yang ada. Dengan kata lain dengan kondisi pada saat ini dengan keadaan pegawai pada Dinas Perhubungan, kemampuan Dinas Perhubungan dalam bidang Perencanaan dianggap cukup teruji dengan dukungan yang sangat kuat dari pegawai yang ada apalagi dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh Karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sedangkan tenaga teknis yang khusus menangani perhubungan darat, laut dan sarana teknik masih sangat dibutuhkan tenaga teknis yang kualifikasinya sesuai dengan bidang tersebut (tenaga sesuai kualifikasi pendidikan masih sangat kurang).

Selanjutnya tabel 2 dibawah ini akan menguraikan jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.

Tabel 2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan/Eselon pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Keadaan 31 Desember 2022

No	Pegawai/karyawan Menurut Jabatan/Eselon (Orang)						
	Jenis Kelamin	Eselon					Jumlah
		V	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	-	12	4	-	-	16
2	Perempuan	-	-	-	1	-	1
Jumlah		-	12	4	1		17

Berdasarkan data di atas ada 1(satu) jabatan yang ada dalam Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur belum terisi.

## **1.6. Isu Strategis / Permasalahan**

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

### **❖ Sekretariat**

- Tidak dapat terselenggaranya bimbingan teknis bagi pegawai dalam Diklat Teknis Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut baik dalam daerah, provinsi maupun ditingkat pusat untuk meningkatkan SDM pegawai dinas perhubungan;
- Kurangnya tenaga di sub bagian keuangan dan pelaporan yang memiliki basic akutansi;

### **❖ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Kurangnya Tenaga Teknis antara lain :

- Staf teknis yang menangani urusan manajemen rekayasa lalu lintas belum ada;
- Kurangnya tenaga PPNS bidang LLAJ;
- Kurangnya tenaga operator komputer;
- Pendataan lokasi-lokasi potensi parkir dan tukang parkir belum terdata secara efektif dan efisien.

### **❖ Bidang Pengembangan dan Teknik**

a. Kurangnya tenaga teknis antara lain :

- Tenaga Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- Tidak tersedianya anggaran untuk Diklat penjenjangan kompetensi penguji kendaraan.

b. Kurang Optimalnya Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor :

- Brake Tester/Alat Uji Rem Utama Kendaraan, hasil uji efisiensi rem kiri dan kanan tidak berfungsi/rusak;

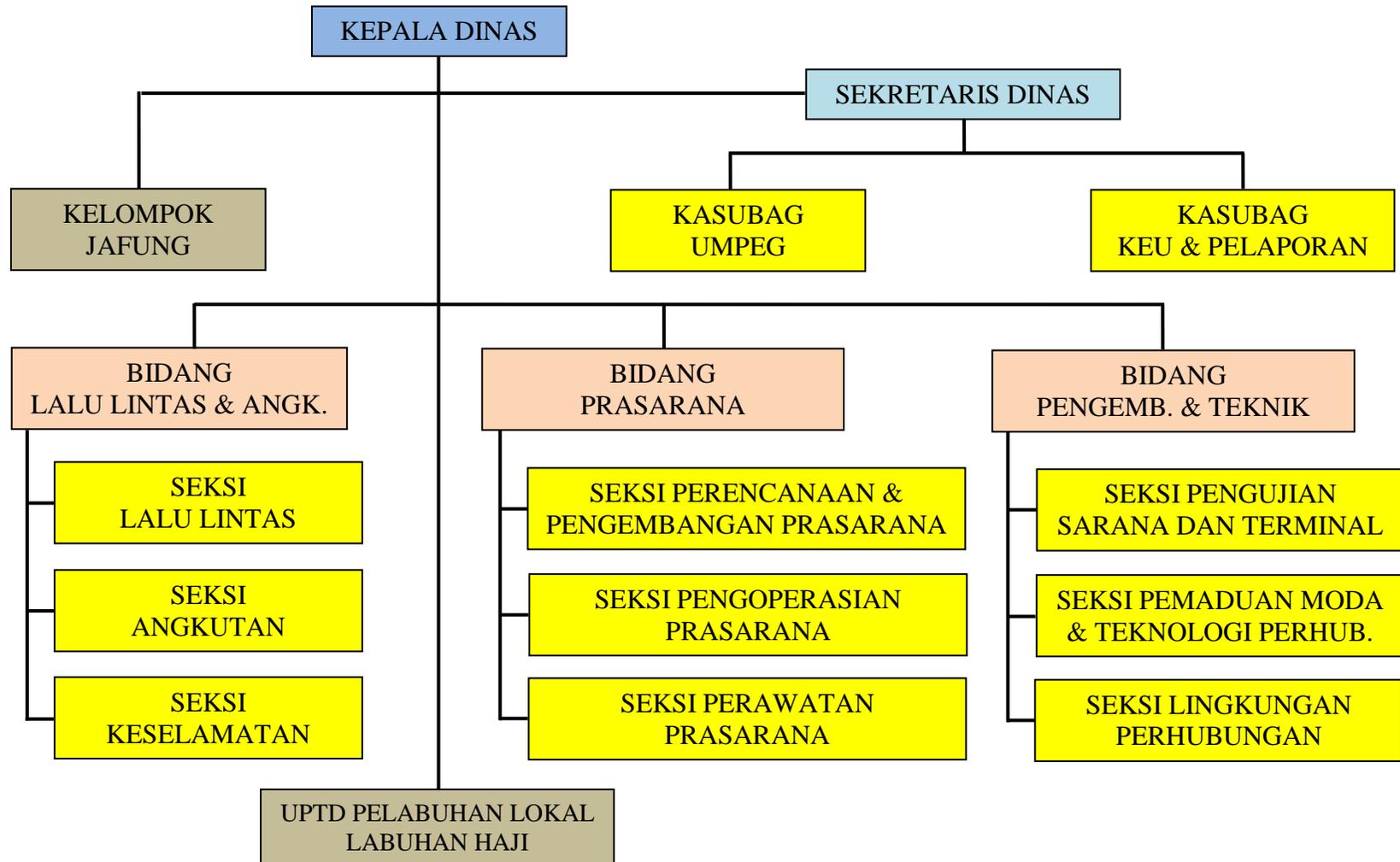
- Axle Load Meter tidak berfungsi (Rusak Berat);
- Axle Play Detector/Alat Uji Suspensi tidak berfungsi maksimal.
- c. Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor masih kurang representatif, seperti ruang tunggu pelayanan uji yang sempit dan kurang nyaman, tidak tersedianya toilet khusus bagi wajib retribusi pada ruang pelayanan;
- d. Belum maksimalnya perlengkapan standar keselamatan kerja bagi penguji kendaraan bermotor;
- e. Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pada seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, seperti sepeda motor dinas;
- f. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pada seksi Lingkungan Perhubungan, seperti peralatan keselamatan dan pendukung kegiatan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;
- g. Tidak tersedianya staf yang memiliki kompetensi pemeliharaan APILL.

#### ❖ **Bidang Prasarana**

- a. Kurangnya Tenaga Teknis :
  - Tenaga S1 Teknik Perkapalan;
  - Tenaga S1 Manajemen Transportasi Laut;
  - Tenaga Diploma IV/Diploma III Nautika ANT-III;
  - Tenaga Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan/KALK;
  - Diploma III Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga/Manajemen Transportasi Laut.
- b. Terbatasnya staf PNS, sehingga untuk berbagi tugas dan pelaksanaan kegiatan tidak efektif;
- c. Permasalahan pada bidang Prasarana dalam keterkaitannya dengan pelabuhan dapat dilihat sebagai berikut :

- Seksi Pengoperasian Prasarana :
  1. Penarikan Retribusi Pas Masuk, Sewa Fasilitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Jasa Kepelabuhanan : berkurangnya retribusi jasa kepelabuhanan di DUKS Labuhan Lombok dan Pelabuhan Tanjung Luar akibat Pandemi COVID-19.
  2. Pelabuhan Lokal Labuhan Haji :
    - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dermaga Pelabuhan lokal labuhan haji. Seperti gudang pelabuhan, fasilitas bongkar muat, dan lain lain.

Grafik 1  
 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Perencanaan pembangunan daerah hendaknya disesuaikan dengan paradigma baru dan memperhatikan keseimbangan dalam kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu Visi Kabupaten Lombok Timur dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Lombok Timur kurun waktu tahun 2018-2023 adalah **“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN “**.

Untuk mencapai Visi diatas, maka **Misi Kabupaten Lombok Timur** adalah :

1. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Wilayah secara berimbang pada Bidang Transportasi, Energi, Irigasi, Air Bersih serta Perumahan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing dan mutu pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau.
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga
5. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik dan religius, serta menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis.
6. Mendorong reformasi birokrasi yang sungguh –sungguh dan pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih, beorientasi kepada pelayanan publik.

#### **2.2. Tujuan dan Sasaran**

<b>VISI</b>	: Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman.
<b>MISI</b>	: Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.
<b>TUJUAN</b>	: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah secara Berimbang pada Bidang Transportasi Darat dan Laut.
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	: Indeks Sarana Perhubungan.

**SASARAN** : Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi.

**INDIKATOR** : Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan.

**SASARAN**

### 2.3. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran diatas ditempuh berbagai kebijakan yaitu :

Sasaran Program	Indikator Program	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan
<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH (P1)</b>			
1. Terwujudnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang tepat, cepat, aman dan nyaman yang berkesinambungan secara terpadu dan menyeluruh Untuk Transportasi Nasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Prosentase Kemantapan Sarpras perhubungan	Koordinasi terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peningkatan DAK, TP, APBN, APBD I dan APBD II
2. Meningkatnya pelayanan angkutan perkotaan dan pedesaan antar moda yang fleksibilitas, akurat, nyaman dan selamat	2.1 Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/ proporsional 2.2 Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai	Prosentase Kualitas Pelayanan dan Tingkat Koordinasi	Koordinasi, regulasi, konstruksi dan fasilitasi sistem jaringan transportasi yang diarahkan pada sistem jaringan lokal
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pelayaran	3.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Menerbitkan Izin Pembangunan, Pengoperasia	Koordinasi, konsultansi, revitalisasi dan konstruksi sarana dan prasarana

	antar kawasan, antar kota dan antar wilayah 3.2 Tersedianya subsidi transportasi	n dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan lokal	wilayah yang diarahkan pada sistem perhubungan laut sesuai pengembangan sistem jaringan infrastruktur dalam Kabupaten Lombok Timur
<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH (P2)</b>			
1. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana prasarana Fasilitas keselamatan jalan	Prosentase sarana dan alat uji kendaraan bermotor yang siap pakai	Mengikutsertakan Aparatur dalam berbagai kegiatan Diklat Profesi
2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatkan konektivitas antar pemangku kebijakan	Prosentase Terkendalinya Keamanan Lalu Lintas	Koordinasi dan Konsultasi

#### **2.4. Rencana Kerja Tahunan**

Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang bertugas membantu Bupati Lombok Timur dalam merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur termasuk melaksanakan tugas-tugas lain yang dipercayakan Bupati Lombok Timur.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 juga diarahkan dengan tetap mengacu pada terlaksananya dukungan pada tercapainya tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur selaku kordinator pembangunan khususnya dalam bidang Perhubungan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan diatas maka ditempuh berbagai program dan kegiatan pada tahun 2021 yaitu :

##### **2.4.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan jasa pelayanan perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

#### **2.4.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Fasilitas Angkutan Darat dan Angkutan Laut yang terintegrasi dengan semua wilayah dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

#### **2.4.3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

Program ini diarahkan Tersusunnya perencanaan hasil Penelitian/survey tatanan transportasi lokal yang menjadi acuan pembangunan di Lombok Timur dengan kegiatan Sebagai berikut;

9. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah;
10. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

**MATRIKS II. 1**  
**RENCANA STRATEJIK**

**INSTANSI** : Dinas Perhubungan  
**VISI** : Terwujudnya transportasi darat dan laut yang handal

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat dan laut	Menciptakan transportasi yang berbasis transportasi terpadu ITS (Intelegent Ttransport System)	Meningkatkan Fasilitas Angkutan Darat dan Angkutan Laut yang terintegrasi dengan semua wilayah	Terlayannya kebutuhan masyarakat dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut	Peningkatan kualitas pembangunan sektor transportasi darat dan laut baik sarana dan prasarana fasilitas keselamatan jalan dan pepadu moda antar simpul transportasi	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Mengembangkan Tata-tatanan Transportasi Lokal berbasis Transportasi Nasional	Tersusunnya hasil Penelitian/ survey tatanan tranportasi lokal yang menjadi acuan pembangunan di Lombok Timur	Laporan Hasil penelitian/survey tentang perkembangan transportasi secara kompleks di wilayah Lombok Timur	- Pemanfaatan rencana ruang secara optimal dan sinergis dengan wilayah sekitar	- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	1	2	3	4	5
				- Peningkatan koordinasi Pusat, Propinsi dan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Mewujudkan E-Government yang menyeluruh	Terklaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terselesaikannya pelaksanaan program kegiatan tepat waktu	Peningkatan kualitas hasil pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**MATRIKS II. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur**

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur

Tugas Pokok : Membantu Bupati Lombok Timur dalam Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Perhubungan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur wilayah secara berimbang pada Bidang Transportasi Darat dan Laut	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda	Prosentase Kemantapan Sarpras perhubungan	Jumlah Sarpras Perhubungan dalam kondisi baik dibagi jumlah Sarpras Perhubungan x 100%	Bidang Pengembangan dan Teknik & Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Prosentase sarana dan alat uji kendaraan bermotor yang siap pakai	jumlah Sarana dan alat uji kendaraan yang siap pakai dibagi jumlah Sarana dan alat uji yang ada x 100	Bidang Pengembangan dan Teknik
		Prosentase Kualitas Pelayanan dan Tingkat Koordinasi	Jumlah Pengaduan/layanan yang tertangani dibagi Total Pengaduan/layanan x 100%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		Prosentase Terkendalinya Keamanan Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terbangun dibagi total kebutuhan x 100%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap arti penting keselamatan Pelayaran	jumlah nelayan yang mendapatkan sosialisasi dibagi total nelayan x 100%	Bidang Prasarana

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan dilakukan dengan menilai kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu menilai indikator-indikator kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil sebagaimana dituangkan dalam formulir Pengukuran.

##### A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kabupaten Berdasarkan RPJMD Tahun 2022

Pengukuran indikator kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan indikator kuantitatif agar lebih terukur dan memudahkan evaluasi. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan sebagai mandat kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis (RPJMD)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1	<i>Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan</i>	<i>Indeks Sarana Prasarana Perhubungan</i>	0,22	0,24

Berdasarkan tabel diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur hanya mencapai 90,12 % Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan. Terhadap capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,24 dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 0,24 maka dapat dijelaskan bahwa walaupun sepertinya tidak ada perubahan, akan tetapi sebenarnya yang terjadi adalah kapasitas jalan tetap namun volume kendaraan yang melalui jalan-jalan yang ada semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah kabupaten semakin baik dalam mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat.

#### **A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja OPD Tahun 2022 dengan 2 (dua) Tahun Sebelumnya**

Untuk memenuhi target IKU Kepala Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur menetapkan Sasaran Strategis “Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda transportasi” dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 adalah “Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang dibagi Jumlah Fasilitas yang dibutuhkan”. Adapun uraian capaian Kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun Sebelumnya	
				Target (%)	Realisasi (%)	%	2021	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda transportasi</i>	<i>Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang dibagi Jumlah Fasilitas yang dibutuhkan</i>	%	50	42,22	84,44	40	37

### A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

NO	PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	<b>100</b>	<b>97,34</b>	<b>97,34</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	<b>14</b>	14	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	<b>16</b>	16	95,83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	97,76	97,76
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	98,65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	13	13	100

NO	PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	Koordinasi dan Penyuusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan	17	17	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	100	100	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	25	25	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100
	Monitoring, Evaluasi , dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	3	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	75,49	75,49
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Paket	35	35	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	95	95	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	30	30	100
	Penyediaan Logistik Kantor	Paket	1000	1000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Paket	47	47	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - perundangan	Dokumen	3	2	81,82
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	156	70	45,17
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	unit	-	-	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	97,24	97,24
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	4	3	71,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	98,93
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	95,34	95,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Unit	37	33	89,44
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	27	90,54

NO	PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	3	3	99,82
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>%</b>			
9	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/Kota				
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota				
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	unit	6	6	99,15
11	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Dokumen	-	-	-
12	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Laporan	20	20	96,67
13	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	2	3	5,88
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala	Unit	1	1	100
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Dokumen	5500	5165	93,90
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	80	5	5,98
14	Pelaksanaan Mananajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Daerah Kabupaten / Kota	Laporan	12	-	-
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	81,29

NO	PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	-	-	-
15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Unit	-	-	-
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota Dalam 1 ( Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	99,95
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>				
16	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	-	-
17	Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoprasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	1	-	-
18	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	13	6	94,58
	Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	12	-	-

#### **A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi**

1. Terkait dengan Kenaikan Prosentase capaian realisasi kinerja pada Tahun 2022, disebabkan oleh bertambahnya lahan parkir di kabupaten Lombok Timur, dimana pada Tahun 2021 tercatat sejumlah 143 Lokasi Area Parkir dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sejumlah 291 Lokasi Area Parkir dengan rincian jumlah lokasi parkir tepi jalan sebanyak 154 dan lokasi khusus parkir sebanyak 137. Upaya yang dilakukan oleh pimpinan adalah dengan melakukan survey-survey potensi area parkir di sejumlah ruas jalan, tempat-tempat pariwisata, rumah makan, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha yang menyediakan tempat parkir. Pada tahun 2021 banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di karenakan banyaknya tempat-tempat pariwisata, tempat hiburan, dan tempat usaha yang menyediakan tempat parkir yang di tutup karena pandemi COVID-19. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan selain disebabkan karena pandemi COVID-19 beberapa dari pihak ketiga yang ditunjuk kurang menguasai situasi di lapangan dan kurangnya koordinasi dengan juru parker yang berada dalam wilayah MoU, dimana dalam MoU tersebutpun tidak diuraikan jumlah setoran pada setiap bulannya sebagaimana jumlah MoU yang disepakati (hanya diberi batas tenggang waktu sampai akhir tahun). Sehingga kedepan diharapkan perlunya segera disusun/diterbitkan dasar hukum yang menguatkan pelaksanaan retribusi parkir, baik pada lokasi parkir tepi jalan maupun pada lokasi parkir tempat khusus serta memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran yang ada.

2. Adanya penurunan realisasi anggaran pada Tahun 2022 dibandingkan dengan reasiasi anggaran Tahun 2021. Pada Tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.12.964.703.685,- atau 97,19% dengan pagu anggaran Rp.13.339.646.745,- setelah perubahan anggaran. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp.18.057.383.430,- atau 93,39% dengan pagu anggaran Rp.19.336.474.980,- setelah perubahan anggaran.

#### **A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan Sumber Daya yang relative efisiensi tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupten Lombok Timur, hal ini disebabkan karena tidak sebandingnya banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja yng menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah Sumber Daya Aparatur yang ada. Akan tetapi kekurangan Sumber Daya Aparatur tersebut sedikit terbantu dengan keberadaan Tenaga Pendukung Kegiatan yang ditempatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Timur berdasarkan perjanjian kerja setiap tahunnya.

Begitu juga dengan keterbatasan sarana prasarana keselamatan jalan yang sampai pada tahun 2022 tercatat baru hanya 1.341 buah dari 2.976 buah yang harus dimiliki agar keselamatan jalan dapat terwujud secara optimal. Kedepan hal ini akan menjadi prioritas untuk

meningkatkan asset sarana prasarana keselamatan jalan yang harus dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, yang akan dimulai dengan penyusunan database sarana prasarana keselamatan jalan yang akan menghimpun seluruh data sarana prasarana keselamatan jalan baik berupa Rambu Lalu Lintas, Guadrill, Marka Jalan, Lampu Penerangan Jalan, RPPJ, Traffic Light, ZOSS dan Road Barrier.

#### **A.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja**

Pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini diarahkan dengan sasaran untuk memperlancar tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam hal penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Bensin, listrik, Alat Komunikasi Gaji pegawai, Tunjangan dan lain-lainnya. Untuk Mendukung program ini kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- ❖ ***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 3.700.000,- dengan realiasi keuangan sebesar Rp. 3.650.000,- atau sebesar 98,65 %;
- ❖ ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***. Kegiatan didukung oleh penyiapan anggaran sebesar Rp. 4.245.856.302.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.190.788.473,- atau sebesar 98,70 % dan realisasi fisik 100 %;

- ❖ **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.** dengan dana sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik 100%;
- ❖ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.** Dengan dana sebesar Rp. 500.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 500.000.- atau sebesar 100% dan realisasi fisik 100%;
- ❖ **Administrasi Umum Perangkat Daerah.** Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 219.682.500.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 165.833.022.- atau 75,49 % dan realisasi fisik 100 %;
- ❖ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.** Dengan dana sebesar Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% dan realisasi fisik 0%;
- ❖ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Kegiatan ini Dengan dana sebesar Rp. 1.969.333.440.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.914.908.652.- atau sebesar 97,24 % dan realisasi fisik 100%;
- ❖ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Kegiatan ini dengan Realisasi Anggaran sebesar 95,34 % dana yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 411.390.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 392.220.033.- dan realisasi fisik 100%;

**b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan untuk mendukung sarana prasarana perhubungan baik fasilitas keselamatan jalan, pengelolaan angkutan, pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan perparkiran, dan pengelolaan terminal Tipe C. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- ❖ **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.** Hasil yang bisa dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Dana yang telah disiapkan untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0% dan realisasi fisik 0%;
- ❖ **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.** Dengan dana sebesar Rp. 871.030.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 811.643.500,- atau 93,18 % dan realisasi fisik 100%;
- ❖ **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.** Dengan dana sebesar Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar 0% atau sekitar Rp.0,- dan realisasi fisik 0%;
- ❖ **Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.** dengan pagu dana sebesar Rp. 2.130.274.600,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.059.323.600,- atau sebesar 96,67% dan realisasi fisik 100%
- ❖ **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.** dengan pagu dana sebesar Rp. 1.699.983.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.136.362.500,- atau sebesar 66,85 % dan realisasi fisik 100%.
- ❖ **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota.** Dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.193.500,- atau presentase sebesar 48,77 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ❖ **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.** Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

199.900.000,- atau presentase sebesar 99,95 % dan realisasi fisik sebesar 100%.

**c. Program Pengelolaan Pelayaran.**

Program ini diarahkan untuk Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tepat, Cepat, Aman dan Nyaman yang Berkesinambungan secara Terpadu, Menyeluruh dan tersedianya dokumen izin operasional rencana induk kepelabuhanan DLKp dan DLKr untuk pelabuhan lokal labuhan haji. Kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

- ❖ ***Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah.*** Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebanyak Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar 0% atau sebesar Rp.0,- dan realisasi fisik 0%.
  
- ❖ ***Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.*** Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebanyak Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau presentase sebesar 0% dan realisasi fisik 0%.
  
- ❖ ***Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.*** Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebanyak Rp. 7.579.715.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.169.091.250,- atau presentase sebesar 94,58 % dan realisasi fisik 100%.

## **A.7. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

### ❖ **Sekretariat**

- Tidak dapat terselenggaranya bimbingan teknis bagi pegawai dalam Diklat Teknis Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut baik dalam daerah, provinsi maupun ditingkat pusat untuk meningkatkan SDM pegawai dinas perhubungan;
- Kurangnya tenaga di sub bagian keuangan dan pelaporan yang memiliki basic akutansi;

### ❖ **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (LLA)**

Kurangnya Tenaga Teknis antara lain :

- Staf teknis yang menangani urusan manajemen rekayasa lalu lintas belum ada;
- Kurangnya tenaga PPNS bidang LLAJ;
- Petugas parkir tidak sebanding dengan jumlah lokasi parkir yang ada, sehingga potensi lokasi-lokasi parkir yang baru belum terdata secara efektif dan efisien.
- Belum adanya database pendataan fasilitas keselamatan jalan yang lebih baik

### ❖ **Bidang Pengembangan dan Teknik**

a. Kurangnya tenaga teknis antara lain :

- Tenaga Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- Tidak tersedianya anggaran untuk Diklat penjenjangan kompetensi penguji kendaraan.

b. Kurang Optimalnya Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor :

- Brake Tester/Alat Uji Rem Utama Kendaraan, hasil uji efisiensi rem kiri dan kanan tidak berfungsi/rusak;
- Axle Load Meter tidak berfungsi (Rusak Berat);

- Axle Play Detector/Alat Uji Suspensi tidak berfungsi maksimal.
- c. Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak representatif, seperti kurang tersedianya toilet khusus bagi wajib retribusi pada ruang pelayanan;
- d. Belum maksimalnya perlengkapan standar keselamatan kerja bagi penguji kendaraan bermotor;
- e. Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pada seksi sarana dan prasarana, seperti sepeda motor dinas;
- f. Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pada seksi pemeliharaan sarana transportasi, seperti sepeda motor dinas, mobil dinas bak terbuka, mobil sky lift dan peralatan pendukung kegiatan pemeliharaan;
- g. Tidak tersedianya staf yang memiliki kompetensi pemeliharaan APILL.

❖ **Bidang Prasarana**

- a. Kurangnya Tenaga Teknis :
  - Tenaga S1 Teknik Perkapalan;
  - Tenaga S1 Manajemen Transportasi Laut;
  - Tenaga Diploma IV/Diploma III Nautika ANT-III;
  - Tenaga Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan/KALK;
- b. Terbatasnya staf PNS, sehingga untuk berbagi tugas dan pelaksanaan kegiatan tidak efektif;
- c. Permasalahan pada bidang prasarana dalam keterkaitannya dengan kepelabuhanan dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Berkurangnya retribusi pada Dermaga Pelabuhan Lokal Labuhan Haji karena tidak diberlakukannya Penarikan Retribusi Pas Masuk.

- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung Dermaga Pelabuhan Lokal Labuhan Haji, seperti gudang pelabuhan fasilitas bongkar muat.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ **Sekretariat**

- a. Bersurat ke OPD yang menangani pengadaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) baik tingkat daerah, provinsi maupun tingkat pusat;
- b. Adanya Sarana dan Parasara untuk menunjang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Pusat maupun Provinsi di Masing-masing Kabupaten/Kota;
- c. Mengusulkan ke Pemerintah Daerah terkait pengadaan pegawai dan penunjukan pejabat yang menangani keuangan sesuai kualifikasi pendidikan akuntansi.

❖ **Lalu Lintas dan Angkutan**

- a. Segera dilakukan penambahan sumber daya yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis di Bidang Perhubungan Darat sesuai kualifikasi Pendidikan Perhubungan Darat seperti lulusan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat);
- b. Melakukan survey angkutan umum sebagai data induk (database);
- c. Pendataan ulang tempat parkir dan lahan parkir yang ada serta pemanfaatannya, atas retribusi yang telah dikeluarkan termasuk petugas parkir;
- d. Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengisi jabatan yang kosong pada seksi bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional pada bidang perhubungan darat;
- e. Mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dapat menganggarkan biaya diklat PPNS untuk bidang LLAJ;

❖ **Bidang Pengembangan dan Teknik**

- a. Mengusulkan ke Pemerintah Daerah terkait pengadaan ASN yang memiliki kualifikasi khusus bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (lulusan DII/DIII PKB) dan Penganggaran Diklat PKB Kompetensi Dasar dan Kompetensi jenjang berikutnya;
- b. Menyediakan anggaran secara rutin setiap tahun untuk perbaikan dan pemeliharaan peralatan uji kendaraan dan pembelian alat baru untuk mengganti alat uji yang rusak berat;
- c. Menyediakan anggaran untuk pembangunan dan renovasi gedung pelayanan pengujian yang representatif untuk kenyamanan wajib retribusi pelanggan saat menunggu pelayanan pengujian kendaraan;
- d. Menyediakan anggaran untuk pengadaan perlengkapan standar keselamatan kerja bagi penguji kendaraan bermotor;
- e. Menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana berupa sepeda motor dinas, mobil dinas bak terbuka, mobil Skylift serta peralatan pendukung kegiatan pemeliharaan sarana transportasi seperti tangga, mesin gerinda, mesin las dan lain-lain;
- f. Mengusulkan ke Pemerintah Daerah terkait penganggaran Diklat Teknisi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/Traffic Light).

❖ **Bidang Prasarana**

- a. Penambahan Tenaga Teknis S1 Teknik Perkapalan;
- b. Penambahan Tenaga Teknis S1 Manajemen Transportasi Laut;
- c. Penambahan Tenaga Teknis Diploma IV Nautika/Diploma II Nautika ANT-III;

- d. Penambahan Tenaga Teknis D-IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
- e. Penambahan Staf PNS di Bidang Perhubungan Laut;
- f. Penganggaran di APBD/APBN terhadap pemeliharaan fasilitas pelabuhan labuhan haji agar kapal aman untuk bongkar muat di pelabuhan;
- g. Penggantian Rambu Suar pelabuhan yang sesuai standar IALA (*International Association of Lighthouse Authorities*);
- h. Fasilitas perlu dilengkapi sesuai persyaratan Kepelabuhanan antara lain gudang pelabuhan, mushalla dan fasilitas bongkar muat.

#### **A.8. Inovasi Perangkat Daerah**

selain solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada seperti yang telah diuraikan diatas, adapun beberpa inovasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang sudah diterapkan untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian target Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, yakni :

1. Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melalui Sub Bidang Angkutan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/558/HUB/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang Dikelola pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, dimana Keputusan ini untuk dijadikan bahan dan rujukan dalam pengelolaan perparkiran yang lebih kedepannya.
2. Di Bidang Pengembangan dan Teknik pada Sub Bidang Pengujian Sarana dan Terminal, telah dilakukan upaya yang lebih baik, baik untuk pihak wajib uji Kendaraan Bermotor yang

akan melakukan pengujian kendaraan bermotornya maupun untuk pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam hal pelaporan, diantara upaya yang telah dilakukan adalah :

- a) Pendaftaran yang akan dilakukan oleh wajib uji kendaraan bermotor tidak hanya secara manual, akan tetapi dapat dilakukan secara online melalui scan QR;
- b) Pembayaran dilakukan secara non tunai melalui EDC, Qris dan M Banking (yang sudah dikerjasamakan dengan PT. Bank NTB Syariah) dengan nomor Rekening 0020100006256 (An. Dishub Retribusi PKB)
- c) Seluruh Aktivitas pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan pelaporannya terbaca secara otomatis melalui Aplikasi SIM PKB

## **B. Realisasi Anggaran**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur pada tahun anggaran 2022 sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Dari hasil pengukuran terhadap kegiatan tahun anggaran 2022 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mencapai hasil yang baik dimana semua kegiatan bisa diukur indikator kinerjanya, baik indikator input, output maupun indikator hasil. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur secara garis besar dibagi dalam 2 jenis yaitu Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang perbandingannya dapat dilihat pada table 1 di bawah ini:

**TABEL 1**  
**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA**  
**DAN REALISASI TA. 2022 PERIODE S/D 31 DESEMBER 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah setelah APBD P (Rp)	Realisasi
1	Pendapatan	3.000.000.000	3.000.000.000	2.203.191.471
2	Belanja	14.909.181.411	13.339.464.745	12.964.703.685
<b>Surplus/ (defisit)</b>		<b>11.909.181.411</b>	<b>10.339.464.745</b>	<b>10.761.512.214</b>

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021 di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur diberikan Target realisasi Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**B.1. Anggaran Pendapatan dan Realisasi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur ditargetkan menerima pemasukan asli pendapatan daerah Tahun 2021 sebesar: Rp.3.000.000.000,- sebelum anggaran perubahan yang mana dalam pencapaian target realisasinya dibagi dalam 4 triwulan Tahun Berjalan yaitu dapat di lihat pada Tabel 2 di bawah ini :

**TABEL 2**  
**RENCANA TARGET PENDAPATAN TAHUN 2021**

NO	URAIAN	TARGET TRIWULAN (RP)	TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP)	CAPAIAN (RP)	Persentase (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan I	750.000.000	750.000.000	449.731.557	14,99 %
2.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan II	750.000.000	750.000.000	232.205.700	7,74 %
3.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan III	750.000.000	750.000.000	1.254.694.800	41,82 %
4.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan IV	750.000.000	750.000.000	432.571.527	14,42 %
<b>JUMLAH</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.369.197.584</b>	<b>78,97 %</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan kepada Dinas Perhubungan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 78,97% atau Rp. 2.369.197.584,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah ) dan atau tidak mencapai 100% target s/d triwulan IV Tahun

2022, hal ini disebabkan beberapa faktor untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 3**  
**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TA 2021**

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PER 31 DES 2022	DALAM PERSEN (%)
1.	<b>Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum</b>	<b>250.000.000</b>	<b>112.315.000</b>	<b>44,93%</b>
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250.000.000	112.315.000	44,93%
2.	<b>Retribusi pengujian kendaraan bermotor</b>	<b>850.000.000</b>	<b>700.636.400</b>	<b>82,43%</b>
	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	850.000.000	700.636.400	82,43%
3.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>787.946.184</b>	<b>71,63%</b>
	Retribusi tempat khusus parkir	750.000.000	639.126.000	85,22%
	Retribusi pelayanan kepelabuhan	350.000.000	148.820.184	42,52%
4.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	800.000.000	768.300.000	96,04%
<b>JUMLAH</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>2.369.197.584</b>	<b>78,97%</b>

Dari tabel di atas dapat terlihat komposisi PAD yang menjadi target Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur. Capaian kinerja keuangan dari Pendapatan Asli Daerah tidak dapat memenuhi target s/d 31 Desember 2022 disebabkan oleh adanya kevakuman pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor selama 3 (tiga) bulan karena harus melakukan akreditasi dan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan diberlakukannya SIM PKB berbasis RFID oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

Untuk Parkir terutama parkir tepi jalan umum terkendala oleh beberapa dari pihak ketiga yang ditunjuk kurang menguasai situasi di lapangan dan kurangnya koordinasi dengan juru parker yang berada dalam wilayah MoU, dimana dalam MoU tersebutpun tidak diuraikan jumlah setoran pada setiap bulannya sebagaimana jumlah MoU yang disepakati (hanya diberi batas tenggang waktu sampai akhir tahun).

Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tidak memenuhi target karena sejak bulan Juli 2022 pelabuhan ditutup untuk proses rehabilitasi fasilitas pelabuhan dan tidak ada lagi pemungutan pas masuk pelabuhan.

## B.2. Anggaran Belanja dan Realisasi

Ikhtisar realisasi pencapaian target Anggaran Belanja Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat di uraikan sebagai berikut :

- Anggaran Belanja sebesar Rp.19.336.474.980,- dengan komposisi belanja Operasi sebesar Rp. 16.862.223.980,- dan belanja Modal sebesar Rp.2.474.251.000,- atau dapat dijelaskan dengan tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4**  
ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI  
PERIODE s/d 31 DESEMBER 2022

URAIAN	JUMLAH	REALISASI	DALAM PERSENTASE
<b>Belanja Operasi</b>	<b>16.862.223.980</b>	<b>15.985.508.430</b>	<b>94,80</b>
- Belanja Pegawai	4.221.422.940	4.187.364.373	99,19
- Belanja Barang dan Jasa	11.652.476.040	10.822.024.057	92,87
- Belanja Hibah	10.000.000	0	0
- Belanja Bantuan Sosial	978.325.000	976.120.000	99,77
<b>Belanja Modal</b>	<b>2.474.251.000</b>	<b>2.071.875.000</b>	<b>83,74</b>
- Belanja Modal peralatan dan mesin	700.200.000	297.824.000	42,53
- Belanja Modal Bangunan dan Gedung	1.774.051.000	1.774.051.000	100
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>19.336.474.980</b>	<b>18.057.383.430</b>	<b>93,39</b>

Belanja Pegawai yaitu belanja gaji PNS dan Tunjangan terealisasi 99,19 persen dan Belanja Barang Jasa terealisasi 92,87 persen dan belanja Bantuan Sosial terealisasi 99,77 persen serta belanja modal yang terealisasi 83,74 persen.

Perbandingan Belanja Operasional yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan Belanja Modal dapat dilihat dari Tabel Berikut ini:

**TABEL 5**  
PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TA. 2021  
PERIODE s/d 31 DESEMBER 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasional	16.862.223.980	15.985.508.430	94,80
2.	Belanja Modal	2.474.251.000	2.071.875.000	83,74
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>19.336.474.980</b>	<b>18.057.383.430</b>	<b>93,39</b>

Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang dibagi untuk Belanja Langsung dan Belanja Langsung yang diperuntukkan dalam 18 Kegiatan dapat dijelaskan seperti pada tabel 6 berikut :

**TABEL 6**  
**KEGIATAN DAN REALISASI PERIODE s/d 31 DESEMBER 2021**

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	1 TAHUN		
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.700.000	3.650.000	98,65 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.245.856.302	4.190.788.473	98,70 %
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000	500.000	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.682.500	165.833.022	75,49 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.969.333.440	1.914.908.652	97,24 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.390.000	392.220.033	95,34 %
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/Kota	-	-	-
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	871.030.000	811.643.500	93,18 %
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	-
Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.130.274.600	2.059.323.600	96,67 %
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.699.983.500	1.136.362.500	83,56 %
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	25.000.000	12.193.500	48,77 %
Penyediaan Angkutan Umum untuk	200.000.000	199.900.000	99,95 %

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	1 TAHUN		
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah	-	-	-
Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	7.579.715.000	7.169.091.250	94,58 %

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas ) kegiatan tahun 2022, pelaksanaan kegiatan telah mencapai hasil cukup baik, yakni rata-rata kegiatan yang dilaksanakan, dimana realisasi keuangannya rata-rata mencapai 71,84 persen walaupun anggaran yang tersedia masih kurang antara lain:
  - Adanya rasionalisasi anggaran;
  - Lemahnya anggaran rutin pada Dinas Perhubungan terutama dalam mendukung Program dan Kegiatan Nasional yaitu untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas (zero accident) dan pelaksanaan deseminasi nasional.
- b. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat diukur indikator kinerjanya baik indikator Input, Output maupun Outcomes. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lampiran I.
- c. Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perhubunan Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari sinergi yang mantap antar semua keluarga besar Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

## 4.2. Saran dan Rekomendasi

Berkenaan dengan apa yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu maka beberapa saran/rekomendasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara terus-menerus khususnya aparatur guna membentuk citra aparatur yang disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi, sehingga mampu meningkatkan kinerjanya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi;
- b. Lebih mengedepankan konsep pembangunan dan peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas, peningkatan informasi pelayanan publik, partisipatif, akumulatif dan sustainable;
- c. Semakin menekankan fungsi dari dokumen-dokumen perencanaan baik jangka pendek menengah maupun penjang sebagai guidelines pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan, terutama perlu adanya Tatralok (Tatanan Transportasi Lokal) Wilayah Kabupaten Lombok Timur sehingga arah pembangunan Transportasi yang Handal di daerah menjadi semakin jelas dan berkesinambungan;
- d. Dukungan personil yang memadai agar dalam upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan dan kesinambungan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.